

SIARAN PERS

FORUM PEMBANGUNAN DAERAH 2022

“Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas untuk Pemulihan Ekonomi, Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Pascapandemi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)”

Yogyakarta, 8 Agustus 2022 — Kemiskinan dan ketimpangan masih menjadi tantangan dalam pembangunan di DIY. Pada 2021, sekitar 12,76% dari total penduduk DIY hidup di bawah garis kemiskinan, angka tersebut masih di atas angka kemiskinan nasional walaupun jumlah orang miskinnya lebih rendah dari rata-rata nasional. Dengan *gini ratio* sebesar 0,436 pada tahun yang sama, DIY juga menjadi provinsi dengan tingkat ketimpangan terbesar di Indonesia. Keduanya menunjukkan bahwa kebijakan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat melalui capaian target pembangunan di DIY masih mengalami kendala yang cukup signifikan, terutama selama pandemi COVID-19. Upaya-upaya penurunan kemiskinan dan ketimpangan di DIY memerlukan keterpaduan dan kerja sama berbagai pihak.

The SMERU Research Institute (SMERU) dan Pemerintah DIY bekerja sama menyelenggarakan Forum Pembangunan Daerah (FPD) yang bertujuan untuk mendukung upaya-upaya penurunan kemiskinan dan ketimpangan tersebut, terutama melalui pengembangan UMKM dan penguatan SDM di DIY.

FPD menjadi wadah dialog kebijakan antar pemangku kepentingan di DIY dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan dan strategi pemerintah daerah untuk penurunan kemiskinan dan ketimpangan melalui pengembangan UMKM serta penguatan SDM.

Sebelumnya, SMERU bersama Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) telah merumuskan dokumen strategi pengembangan UMKM yang didasarkan dari penelitian terkait UMKM yang telah dilakukan kedua pihak. “Proses kolaborasi ini kami harapkan akan terus berlanjut sehingga dapat membantu dan mendorong pengembangan UMKM sebagai satu strategi penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan di DIY, terutama setelah kita dihantam pandemi selama hampir 3 tahun ini” ujar Ibu Widjajanti Isdijoso selaku Direktur SMERU.

Selain UMKM, acara FPD juga membahas perlindungan sosial dan kesejahteraan penduduk lanjut usia (lansia) dan tantangan peningkatan SDM berkualitas melalui inovasi pendidikan. “Dua tema ini kami pilih karena sejalan dengan tantangan terkait populasi menua (*ageing population*) dan bonus demografi yang dihadapi DIY khususnya, dan Indonesia umumnya, yang perlu kita sikapi dengan serius” tambah Widjajanti Isdijoso.

Peran pemerintah daerah dalam mendukung penghapusan kemiskinan ekstrem.

Pemerintah daerah dapat membantu dalam hal menyukseskan registrasi sosial-ekonomi, memperkuat kelembagaan dan kapasitas SDM, komitmen penyediaan dana untuk pendataan di lapangan, regulasi dan komitmen politik dari berbagai pihak termasuk lingkungan yang inklusif berupa ketersediaan data untuk kelompok rentan (disabilitas dan lansia).

Khusus mengenai pendataan di lapangan, “Kita tahu bahwa Pemerintah masih terus memperbaiki akurasi DTKS. Namun karena DTKS hanya mencakup 40% penduduk berpenghasilan terendah, sementara program pemerintah makin berkembang untuk menjangkau calon peserta yang lebih luas. Kita membutuhkan data yang lebih menyeluruh.” ujar Pungky Sumadi (Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas).

Oleh karena itu, di tahun 2022, Kementerian PPN/Bappenas menitikberatkan fokus pada perbaikan DTKS dan pendataan 100% penduduk. “Data ini tidak hanya berguna untuk penanggulangan kemiskinan tetapi juga untuk program-program lain. Jika datanya sudah baik, maka pemringkatan jadi lebih baik sehingga pemerintah dapat menjalankan program kemiskinan ekstrem dengan teritorial atau ‘keroyokan’” tambah Pungky Sumadi.

Aplikasi SiBakul berperan dalam memfasilitasi penguatan KUKM sekaligus wadah pembinaan bagi koperasi dan pelaku usaha di DIY.

UMKM merupakan salah satu penopang perekonomian DIY. Ketika terjadi krisis ekonomi, sektor UMKM adalah salah satu sektor yang masih bertahan. “Lebih dari 60% ekonomi DIY disokong oleh UMKM” ujar Gubernur DIY.

Pemerintah DIY telah melakukan penguatan fondasi ekosistem digital, salah satunya melalui kanal SiBakul Jogja yang merupakan bentuk digitalisasi model pembinaan sirkular DISKOP UKM DIY bagi pelaku Koperasi dan UMKM di DIY. “SiBakul hadir untuk menjembatani UMKM yang mampu mengintegrasikan antara dunia maya dengan ruang fisik tanpa ruang batas dan waktu, platform digital ini juga merupakan wadah pendataan dan klusterisasi UKM” jelas Gubernur DIY. Bagi pelaku usaha yang sudah terintegrasi akan banyak dapat fasilitas baik dalam hal legalitas, konektivitas, pemasaran, pembinaan dan pengembangan usaha, dll.

Masih terdapat ruang ruang untuk mengoptimalkan SiBakul sebagai upaya pengembangan UMKM.

Kehadiran SiBakul berperan cukup strategis dan perlu dioptimalkan sebagai ekosistem bisnis digital UMKM yang inklusif dengan fokus pada pengembangan UMKM kategori mikro dan ultramikro dalam rangka pemulihan ekonomi serta penurunan kemiskinan dan ketimpangan. Tim peneliti UMY dan SMERU telah merumuskan catatan kebijakan yang merekomendasikan empat (4) langkah prioritas untuk mengembangkan SiBakul dalam jangka pendek.

“Keempat langkah tersebut adalah mengedepankan asas keinklusifan SiBakul bagi semua kategori UMKM, mengarahkan fungsi utama SiBakul ke pendataan UMKM yang mutakhir dan komprehensif, memosisikan SiBakul sebagai katalog produk UMKM terlengkap di DIY dengan navigasi yang ramah pengguna, dan mempromosikan SiBakul kepada pelaku UMKM dan konsumen secara lebih luas dan efektif.” ujar Bapak Prof. Rizal Yaya selaku Ketua Kelompok Kerja UMKM yang juga Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UMY.

Untuk langkah selanjutnya, Pemda DIY perlu menyusun peta jalan pengembangan ekosistem SiBakul yang inklusif. Hal ini perlu disertai penguatan regulasi dan kebijakan serta dukungan infrastruktur internet yang memadai. Selain itu, berbagai pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam upaya ini melalui sinergisme pentahelix (melibatkan academia, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media).

Indonesia dan DIY harus bersiap dengan populasi menua

Data 2019 menunjukkan proporsi lansia di DIY sekitar 14,5%, lebih tinggi dari rata-rata nasional (9,6%). Di samping itu, jika dilihat dari tingkat kemiskinan berdasarkan kelompok usia, data juga menunjukkan bahwa angka kemiskinan tertinggi terdapat pada kelompok usia lansia. Di DIY pada tahun 2019, angka tingkat kemiskinan lansia sangat tinggi yaitu 17,4%, lebih tinggi dari angka kemiskinan lansia nasional.

Mengapa perlu perlindungan sosial lansia?

Lansia menghadapi tiga (3) risiko dalam siklus hidupnya: 1) meningkatnya insiden disabilitas/keterbatasan fungsi. Semakin tinggi usia, kemungkinan mengalami insiden disabilitas/keterbatasan fungsi yang semakin tinggi dan berat; 2) menurunnya kondisi kesehatan. Separuh lansia mengalami gangguan kesehatan dan seperempat lansia mengalami sakit; dan 3) berkurangnya pendapatan atau tidak memiliki pendapatan sehingga dalam faktanya separuh dari penduduk lansia masih harus bekerja. Bahkan di DIY, hampir 60% lansia bekerja.

Selain itu, meskipun sekitar 86,4% lansia telah menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), namun hanya sekitar 18,4% lansia di Yogyakarta yang memiliki jaminan pensiun/veteran dan 12,2% lansia yang memiliki Jaminan Hari Tua (JHT).

"Menyadari permasalahan lansia tersebut, Pemerintah DIY telah menginisiasi beberapa program perlindungan sosial daerah (dalam bentuk bansos) untuk membantu kelompok lansia terutama untuk lansia miskin. Namun, cakupan penerima programnya masih sangat terbatas dan keberlanjutannya perlu dijaga. Ini yang perlu kita dorong untuk terus ditingkatkan. Sebagai tambahan kelompok usia produktif termasuk pengelola-pekerja UMKM perlu didorong agar memiliki tabungan dan/atau jaminan hari tua untuk persiapan di usia lanjut nanti". Hal ini dijelaskan oleh Sri Kusumastuti Rahayu, Penasehat Tim Kebijakan Perlindungan Sosial, Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Zonasi untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan di DIY

Kebijakan zonasi dilaksanakan secara serentak berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.17/2017 bertujuan untuk mengurangi, jika bisa menghilangkan, ketimpangan kualitas pendidikan di Indonesia.

DIY merupakan daerah dengan pendidikan berkualitas yang ditunjukkan dengan pencapaian *learning outcome* terbaik di Indonesia. DIY meraih peringkat tertinggi secara nasional dalam skor UNBK SMP/MTs di tahun 2019 dan skor PISA siswa SMP di DIY juga lebih tinggi dari rata-rata skor nasional. Namun, beberapa tantangan masih dihadapi DIY dalam usahanya untuk pemerataan kualitas pendidikan seperti disparitas antara sekolah negeri dan sekolah swasta yang tidak tersebar secara merata.

Lalu apa yang terjadi ketika zonasi dilaksanakan di DIY? "Meski zonasi meningkatkan akses siswa dari keluarga kurang mampu ke SMP Negeri, tetapi zonasi berdampak negatif pada pencapaian pembelajaran beberapa kelompok siswa tertentu, khususnya mereka yang tetap bisa mendapat akses ke SMP Negeri meski pemerintah menerapkan kebijakan zonasi dan mereka yang kehilangan akses ke SMP Negeri karena kebijakan zonasi. Selain itu, zonasi juga tidak memiliki dampak berarti terhadap pencapaian pembelajaran siswa yang mendapat akses ke SMP Negeri setelah zonasi. Oleh karena itu, kita tetap perlu mengawal terus kebijakan zonasi ini agar dapat mencapai tujuan yang sebenarnya, dan di sinilah pentingnya peran riset sebagai dasar pengambilan kebijakan." ujar Sirojuddin Arief, peneliti senior The SMERU Research Institute.

Untuk keterangan lebih lanjut, silakan hubungi:

Ratri Indah Septiana Kepala Bidang Komunikasi The SMERU Research Institute rseptiana@smeru.or.id 08161361514

Materi presentasi para pembicara dapat diunduh di: <https://smeru.or.id/id/event-id/forum-pembangunan-daerah-2022>

Tentang The SMERU Research Institute

SMERU adalah lembaga independen yang melakukan penelitian dan kajian kebijakan publik. Sejak didirikan pada 2001, SMERU telah menjadi lembaga terdepan dalam melakukan kajian di bidang kemiskinan dan ketimpangan. Informasi lebih lanjut tentang SMERU dapat dilihat di <https://smeru.or.id>